



**IMPLIKASI POLITIK PERJANJIAN ANGLO - SIAM TAHUN 1909
TERHADAP WILAYAH – WILAYAH BAGIAN THAILAND SELATAN**

***(THE POLITICAL IMPLICATIONS OF THE ANGLO-SIAM TREATY ON
THE SOUTHERN PARTS OF THAILAND IN 1909)***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Haris Daleng
NIM 150910101063**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

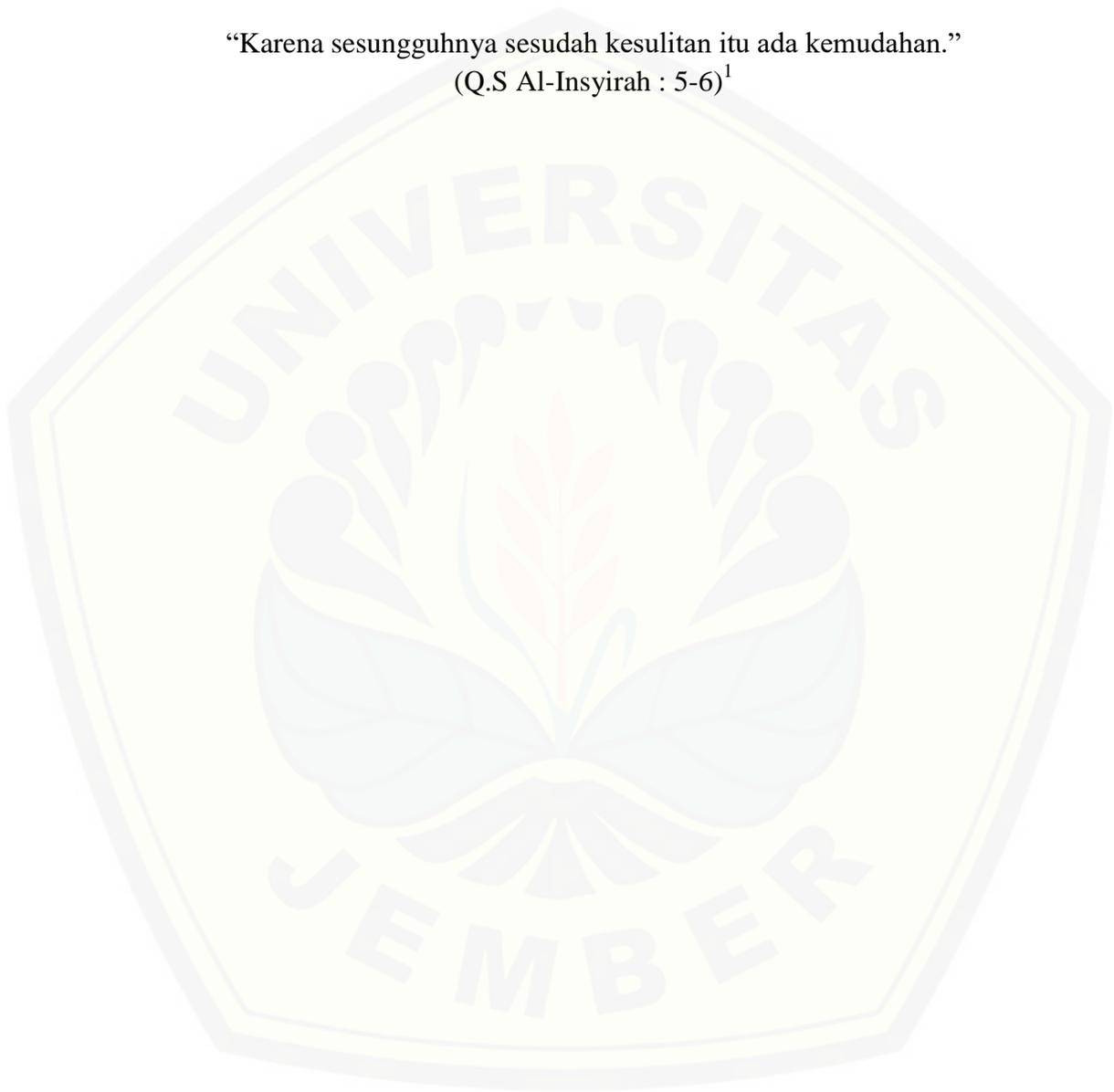
PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu tercinta;
2. Kakak-kakak dan Adik-Adik saya tercinta;
3. Teman-Teman tercinta;
4. Himpunan mahasiswa Patani Selatan Thailand Di Indonesia (HMPI);
5. Guru-guru saya sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi;
6. Almamater;
7. Ilham Wahyudi, Asmin Kamae dan teman-teman di Jurusan Hubungan Internasional yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa;
8. Sahabat dan teman-teman di Himpunan Mahasiswa Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (HMPI) yang banyak berjasa pada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Sahabat dan teman-teman lainnya yang telah berjasa pada penulis;
10. Pembaca

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(Q.S Al-Insyirah : 5-6)¹



¹ Maulida, Ulyaeni. 2020. 40 kata-kata al-qur'an. <https://www.dream.co.id/your-story/40-kata-kata-bijak-islami-dari-al-quran-2005131.html>. “Diakses pada” 31 Agustus 2020

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Daleng

NIM : 150910101063

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implikasi Politik Perjanjian Anglo-Siam Tahun 1909 Terhadap Wilayah-Wilayah Bagian Thailand Selatan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Oktober 2020

Yang menyatakan

Haris Daleng
NIM 150910101063

SKRIPSI

**IMPLIKASI POLITIK PERJANJAIN ANGLO-SIAM TAHUN 1909
TERHADAP WILAYAH-WILAYAH BAGIAN THAILAND SELATAN**

Oleh

Haris Daleng
NIM 150910101063

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supriyadi, M.Si
Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implikasi Politik Perjanjian Anglo-Siam Tahun 1909 Terhadap Wilayah-Wilayah Bagian Thailand Selatan” telah diuji dan disahkan pada :

hari : Rabu
tanggal : 21 Oktober 2020
waktu : 09.00 WIB
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :
Ketua

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP 195908311989021001

Anggota I

Anggota II

Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP 196305261989022001

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos.,M.Si.
NIP 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.
NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Implikasi Politik Perjanjian Anglo-Siam Tahun 1909 Terhadap Wilayah-Wilayah di Thailand Selatan; Haris Daleng; 150910101063; 2020; 57 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Konflik keamanan di wilayah-wilayah Thailand Selatan masih menjadi isu keamanan hingga saat ini di Thailand. Pasca kekalahan kerajaan Patani atas Siam, wilayah-wilayah milik Patani diambil alih oleh Kerajaan Siam. Hal ini kemudian ditambah masuknya pengaruh kolonialisme Inggris yang ingin menguasai semenanjung Malaka sehingga untuk melindungi kekuasaan Siam dari Inggris, kedua kekuatan besar tersebut melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang disebut Perjanjian Anglo-Siam Tahun 1909. Isi perjanjian ini adalah kesepakatan untuk saling mengakui daerah kekuasaan masing-masing. Namun, masyarakat asli pemilik daerah yang dikuasai tidak setuju dengan tindakan tersebut termasuk Muslim-Melayu Patani. Disaat muncul kebijakan-kebijakan oleh pemerintahan Siam yang menekan bentuk-bentuk penolakan atas perjanjian tersebut, muncul kemudian aksi-aksi pemberontakan dari masyarakat Muslim-Melayu Patani yang kemudian terjadi hingga saat ini.

Penelitian ini membahas pada implikasi politik yang ditimbulkan dari perjanjian Anglo-Siam tahun 1909 yang menjadi sumber konflik berkepanjangan di wilayah-wilayah Thailand Selatan hingga saat ini. Data sekunder dari buku sejarah dan sumber berita dianalisis secara deskriptif lewat studi historiografis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi politik dari perjanjian Anglo-Siam menyebabkan hilangnya wilayah kerajaan Patani. Eksistensi politik kerajaan Patani resmi menghilang dan digantikan oleh penguasa barunya yaitu Siam. Akibat dari hilangnya eksistensi politik kerajaan Patani ini mulai muncul kebijakan-kebijakan baru dari Siam yang bersifat menekan kelompok masyarakat asli Muslim-Melayu yang tinggal di sana. Kerajaan Siam merubah bentuk hukum,

pendidikan dan budaya masyarakat Muslim-Melayu menjadi bentuk dan sistem yang sama seperti kerajaan Siam. Hal ini yang menjadikan akumulasi aksi pemberontakan dari masyarakat Muslim-Melayu Patani untuk melawan kerajaan Siam yang terjadi hingga saat ini.



PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Politik Perjanjian Anglo-Siam Tahun 1909 Terhadap Wilayah-Wilayah Bagian Thailand Selatan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Drs. Supriyadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Pra Adi Soelistojono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Honest Dody Molasy S.Sos, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik atas dorongan dan bimbinganya selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Keluarga yang selalu memberikan dukungan pada penulis;

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 21 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	ii
MOTO	iii
PERNYATAAN	iv
SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1	14
PENDAHULUAN	14
1. 1 Latar belakang	14
1. 2 Rumusan Masalah	16
1. 3 Ruang Lingkup Pembahasan	16
1. 4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. 5 Landasan Konseptual	17
1. 5. 1 Konsep Imperialisme dalam Politik	17
1. 6 Argumen Utama	20
1. 7 Metode Penelitian	21
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	21
1.7.2 Metode Analisis Data	21
1. 8 Sistematika Penulisan	22
BAB 2	24
SEJARAH PERADABAN KERAJAAN PATANI	24
2.1 Bukti Sejarah Kerajaan Patani	24

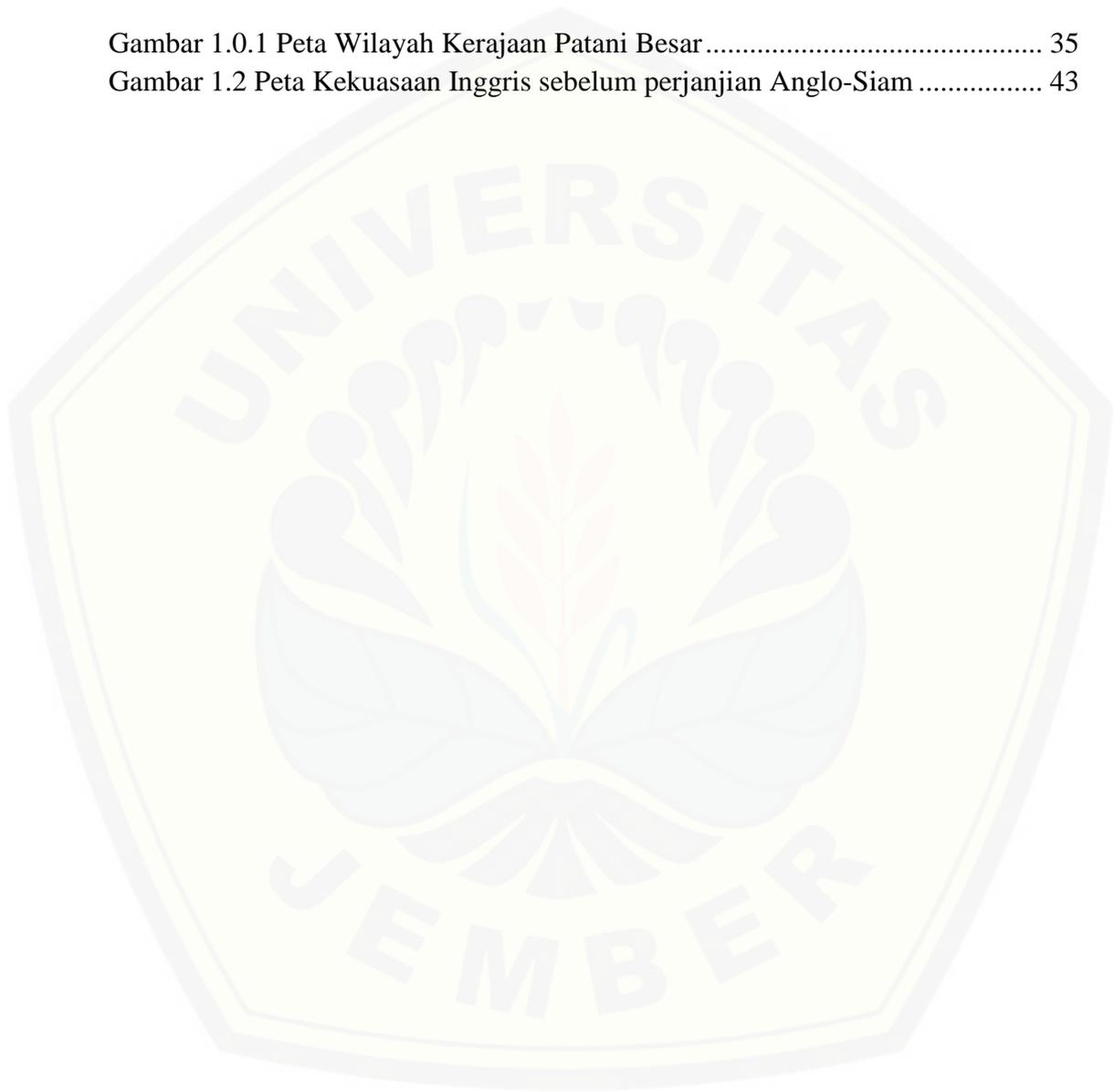
2.1.1	Periode Kerajaan Langkasuka.....	25
2.1.2	Periode Kerajaan Patani	27
2.2	Asal Mula Kerajaan Patani Memeluk Islam.....	28
2.2.1	Periode Kepemimpinan Sultan Muzaffar Syah.....	29
2.2.2	Perebutan Tahta Dalam Kerajaan Patani.....	31
2.3	Sejarah Kepemimpin Kerajaan Patani Era Ratu-Ratu.....	32
2.3.1	Era Kepemimpinan Raja Hijau (1584-1616)	32
2.3.2	Era Kepemimpinan Raja Biru (1616-1624).....	33
2.3.3	Era Kepemimpinan Raja Ungu (1624 - 1635)	33
2.3.4	Era Kepemimpinan Raja Kuning (1635-1651)	35
2.4	Situasi Patani Setelah Kepemimpinan Raja Kuning	38
BAB 3	40
SUKSESI KERAJAAN SIAM DAN KETERLIBATAN INGGRIS		40
3.1	Kekalahan Patani Atas Siam	40
3.2	Keterlibatan Inggris Dalam Konflik Siam-Patani	41
3.3	Proses Pembentukan Perjanjian Anglo-Siam.....	43
3.3.1	Persekutuan Antara Siam dan Inggris	43
3.3.2	Proses Negosiasi Antara Siam dan Inggris	44
BAB 4	47
IMPLIKASI DARI PERJANJIAN ANGLO-SIAM TAHUN 1909 TERHADAP WILAYAH-WILAYAH DI THAILAND SELATAN		47
4.1	Hilangnya Eksistensi Politik Kerajaan Patani Besar.....	47
4.1.1	Wilayah Patani Besar Terbagi Menjadi Wilayah Resmi Kerajaan Siam (Pemerintah Thailand) dan Koloni Inggris	49
4.1.2	Munculnya Pengakuan Secara De Jure dari Kekuasaan Siam dan Inggris	50
4.2	Perubahan Kebijakan Kerajaan Patani Menjadi Kebijakan Siam	51
4.2.1	Aspek Pemerintahan.....	51
4.2.2	Aspek Sosial-Budaya	52
BAB 5	56
KESIMPULAN		56

Daftar Pustaka 57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0.1 Peta Wilayah Kerajaan Patani Besar 35
Gambar 1.2 Peta Kekuasaan Inggris sebelum perjanjian Anglo-Siam 43



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Thailand merupakan salah satu Negara di kawasan Asia Tenggara. Sejarah pembentukan Negara Thailand saat ini berasal dari beberapa peradaban kerajaan dengan mayoritas penduduknya beragama Budha (Suphasit, 2012). Wilayah Negara Thailand saat ini diakui secara internasional membentang dari sisi utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sisi timur dengan Kamboja dan selatan dengan Malaysia. Namun beberapa bagian selatan masih mengalami masalah hingga saat ini. Penduduk di kawasan Thailand bagian selatan merupakan basis masyarakat Melayu-Muslim. Sejarah konflik ras dan agama dengan masyarakat mayoritas Thailand lain didasarkan pada persengketaan wilayah dengan latar belakang sejarah aneksasi wilayah antar kerajaan sejak dahulu.

Wilayah Selatan yang masih bergejolak merupakan asal mula dari kerajaan Patani yang kini menjadi salah satu dari lima provinsi di Thailand Selatan. Provinsi ini terbagi menjadi provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla yang mayoritas penduduknya banyak dihuni oleh umat Islam. Sebelumnya, Patani pernah menjadi kerajaan Islam yang mencapai puncak kejayaan hampir 3 Abad di semenanjung Melayu. Setelah wafatnya Raja Kuning terjadi perebutan kekuasaan dikalangan atasan-atasan dalam istana, sehingga kondisi kerajaan tersebut semakin lemah (Kateh, 2015 : 36). Hal ini ditambah lagi dengan adanya penyerbuan yang dilakukan oleh Siam (Thailand) terhadap kerajaan Patani, sehingga Kerajaan Pattani mulai mengalami keguncangan politik. Hal ini menjadikan kerajaan tersebut dengan mudah dapat ditaklukkan oleh Siam. Kerajaan Siam akhirnya menguasai Kerajaan Patani pada akhir abad ke 18 (1785 M.).

Pada awal abad ke - 20, negeri-negeri di Semenanjung Melayu berada dalam perebutan antara dua kekuasaan yaitu Siam dan Inggris. Dua kubu tersebut saling berebut kekuasaan. Siam menjajah negeri-negeri Melayu dari Utara

semenanjung hingga ke Selatan dan kolonialisme Inggris berkembang dari Selatan ke arah Utara. Siam berusaha untuk mempertahankan kedaulatan wilayah kekuasaannya terutama dari serangan Burma dan Inggris. Akhirnya kedua negara melakukan kesepakatan pembagian wilayah dengan Inggris, apalagi Inggris juga memiliki ambisi untuk menguasai semenanjung Melayu dan kepentingan untuk menghambat pengaruh Jerman di tanah Melayu (Kateh, 2015 : 38).

Kesepakatan antara Siam dan Inggris ini yang disebut sebagai Perjanjian Anglo-Siam. Perjanjian Anglo-Siam menyebabkan kerajaan Siam kehilangan kekuasaannya di wilayah negeri - negeri Melayu seperti Kedah, Trengganu, Kelantan dan Perlis akan tetapi tetap bisa menguasai Patani dan Setul. Perjanjian itu sebagai pengakuan Inggris terhadap kekuasaan dan kedaulatan Siam atas dua negeri tersebut, disamping Siam juga dapat mempertahankan kedaulatan wilayahnya dari ancaman penjajahan sehingga strategi inilah yang membuat sejarah mengapa Thailand tidak pernah menjadi mangsa penjajahan Barat pada waktu itu dibandingkan dengan negeri-negeri lain di Asia Tenggara (Suphasit, 2012).

Perjanjian antara Siam dan Inggris ini tentunya menimbulkan gejolak, utamanya penolakan yang keras dari orang-orang Melayu penduduk setempat terutama Patani dan Setul. Perjanjian ini membuat kelompok Melayu memberikan respon dalam bentuk perlawanan. Masyarakat Muslim-Melayu Patani yang dipimpin oleh Tengku Abdulqadir Kamaruddin (raja Patani terakhir) dalam upayanya untuk mempertahankan identitas dan kedaulatan bangsa Melayu Patani dari penjajah Siam akhirnya terus memperjuangkan kedaulatannya semenjak itu.

Perjanjian Anglo-Siam membuat masalah pemberontakan terus berjalan sampai sekarang dari masyarakat Patani. Apabila menelisik pada faktor keadaan bahwa kesultanan Patani saat itu telah berada di bawah kekuasaan Siam hal ini memang dibenarkan, Menurut teori kekuasaan dalam pembentukan negara hal tersebut dimungkinkan jika negara penguasa ingin melakukan keputusan semena-mena terhadap daerah jajahannya. Namun mengingat pada masa itu masih adanya eksistensi kekuasaan asli yang ada di daerah itu yaitu kesultanan Islam Patani di bawah Tengku Abdulqadir Kamaruddin bukan bagian dari Siam tetap melekat

hingga sekarang. tidak dapat disalahkan apabila masyarakat di beberapa provinsi di Thailand Selatan sampai sekarang ini juga masih memperjuangkan kemerdekaanya.

Berdasarkan pemaparan kronologi peristiwa tersebut di atas mendasari tulisan ini untuk membahas mengenai implikasi politik dari perjanjian Anglo-Siam. Sesuai dengan artinya, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia implikasi dapat berarti “keterlibatan atau keadaan terlibat” dari suatu objek. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada bagaimana keterlibatan dari setelah diberlakukanya perjanjian tersebut terhadap masyarakat dari kerajaan Patani. Cakupan ini kemudian membuat penulis bermaksud membuat penelitian dengan judul “Implikasi politik perjanjian Anglo-Siam tahun 1909 terhadap wilayah-wilayah bagian Thailand Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas maka penulis ingin merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana implikasi politik dari perjanjian Anglo – Siam tahun 1909 terhadap wilayah- wilayah di Thailand selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan ini membahas seputar alasan dibentuknya perjanjian anglo-siam oleh Kerajaan Siam dan Inggris serta implikasi politik pada Kerajaan Patani dan masyarakatnya setelah perjanjian tersebut resmi dibentuk. Batasan waktu yang digunakan adalah sebelum perjanjian ini dibuat sampai pada akhir perjanjian ini resmi berlaku yaitu di antara tahun 1909 hingga implikasinya sekarang ini yang masih menimbulkan pemberontakan di Thailand Selatan.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk

- Mengetahui implikasi politik dari perjanjian Anglo – Siam di tahun 1909 terhadap kelangsungan hidup peradaban masyarakat dari wilayah di Thailand Selatan (Patani).
- Menjadi bahan rujukan dalam melakukan kajian tentang resolusi perdamaian yang dapat diambil di Thailand Selatan.

1.5 Landasan Konseptual

Dalam menghadapi gejala historis setiap penggambaran atau deskripsi suatu permasalahan memerlukan adanya pendekatan konseptual sehingga dapat digunakan sebagai alat penyaringan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Perlunya penggunaan teori konflik guna mengupas konflik-konflik yang terjadi pada Muslim etnis Melayu-Patani di Thailand Selatan, mengingat pembahasan ini akan kembali pada sejarah sebelum konsep-konsep negara berdaulat terbentuk di mana pendudukan atas teritorial wilayah kekuasaan lain masih dimungkinkan, maka Landasan Konseptual yang akan membantu penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1.5.1 Konsep Imperialisme dalam Politik

Imperialisme adalah semacam bentuk praktek hierarki internasional yang mana satu unit politik, atau pemerintahan, secara efektif memerintah atau mengontrol pemerintahan lain. Praktik ini merupakan salah satu lembaga politik tertua yang pernah dikenal. Hal ini mencirikan hubungan antara penguasaan atas suatu wilayah kelompok lain untuk kemudian diklaim sebagai wilayah teritorialnya. Praktek ini telah lama ada, misalnya sejak orang-orang di jaman peradaban Mesopotamia kuno, dinasti di Cina, dan kerajaan di Roma. Imperialisme berkembang pada peradaban baru sejak Eropa modern mulai berekspansi dan membentuk koloni-koloni di luar negerinya. Hal ini yang juga kemudian membuat imperialisme dekat dengan konsep kolonialisme.

Sebagai konsep analitik, imperialisme mengacu pada sebuah upaya dominasi yang efektif dari satu komunitas politik kepada entitas politik lain. Menurut Michael Doyle (Lake, D. A. 2001), Imperialisme berasal dari kata

“empires” yang mengungkapkan hubungan kontrol politik yang dipaksakan oleh beberapa masyarakat politik yang berlaku secara efektif atas kedaulatan masyarakat politik lainnya. Imperialisme adalah proses membangun dan memelihara suatu kerajaan dengan dominasi yang dimaksud adalah kemampuan dalam memerintah secara dominan, berpusat, untuk memutuskan kebijakan-kebijakan bagi para bawahannya (koloni). Kemampuan ini terkadang memerlukan pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan yang substansial kepada anggota elite koloni tetapi dengan tetap mempertahankan kekuatan pusat untuk memutuskan apa yang akan didelegasikan, bagaimana dan kapan otoritas ini akan dicabut.

Penjelasan utama dalam konsep imperialisme dapat dikelompokkan dalam tiga kategori umum. Pertama dalam Teori Metrocentric yang berfokus pada disposisi atau karakteristik internal negara-negara kuat. John Hobson dan memberikan pendapat menggambarkan alasan-alasan suatu entitas politik besar melakukan upaya dibalik dilakukannya imperialisme. Salah satu yang diutarakan Hobson misalnya membahas mengenai motivasi yang mendasari ekspansi kekuasaan ke luar negeri adalah akibat kebutuhan untuk memajukan negara-negara kapitalis dalam mengeksport kelebihan modal mereka. Teori Metrocentric menjelaskan bahwa imperialisme didasari atas kebutuhan penguatan kekuatan pusat dengan menambah wilayah-wilayah baru.

Kedua dari Teori Pericentric yang menekankan perluasan atas situasi penjajahan. Pada saat teori metrocentric fokus pada alasan atau motif dibalik dimulainya upaya ekspansi, teori pericentric lebih menggambarkan bahwa praktik imperialisme merupakan sebuah bentuk hubungan dari hierarki. John Gallagher and Ronald Robinson dalam bukunya *The Imperialism of Free Trade* (1953) (Cohen, 1973) banyak membahas tentang tradisi hirerarki ini. Mereka berpendapat bahwa akibat letak sebuah kekuatan politik berbeda-beda maka situasi ini secara konstan mengarah pada upaya keinginan dominasi dan penguasaan dimanapun pada waktu yang tepat. Gallagher and Robinson menjelaskan beberapa variasi dari bentuk imperialisme dengan mengacu pada kondisi wilayah yang dikuasai. Misalnya kedaan di saat wilayah yang akan

dikuasai dirasa masih memiliki kondisi rezim yang stabil dan kerjasama yang kuat maka negara yang akan menguasai menggunakan pendekatan perintah secara informal dan tidak langsung, misalnya pada ketergantungan ekonomi yang saat ini lebih dikenal dengan istilah neokolonialisme. Baru di saat wilayah yang ingin dikuasai mengalami syarat-syarat imperialisme langsung tertentu seperti ketidakstabilan politik internal maka penggunaan serangan secara formal dan langsung dapat dilancarkan. Praktik ini bisa kita lihat dalam kasus Inggris Raya dalam mengatur Argentina dimana saat pelepasan kekuasaan formal dilakukan, namun esensi kekuasaan sebenarnya tidak hilang, karena dengan merubahnya pada bentuk jaringan pasar ekonomi yang biasa disebut neokolonialisme.

Terakhir dalam pendekatan Teori imperialisme sistemik, yang biasanya sering disebut sebagai bagian dari teori realis dari hubungan internasional. Teori ini menyoroti persaingan antara kekuatan besar (Cohen, 1973). Asumsinya mengungkapkan bahwa atas nama perjuangan untuk bertahan hidup dan menyeimbangi pengaruh kekuatan besar lain maka dibutuhkan terciptanya persaingan dengan pengaruh yang semakin melebar kedaerah lain, dalam perspektif ini, keduanya mencoba untuk memimpin perebutan wilayah untuk menambah sumber daya mereka dan memungkinkan mereka untuk saling mengimbangi satu sama lain dengan menggunakan wilayah phery-phery agar tercipta keseimbangan kekuasaan yang efektif. Kasus klasik imperialisme yang digerakkan oleh persaingan sistemik ini misalnya dapat ditemui pada upaya perlombaan negara-negara Eropa Barat dalam menaklukan kawasan Afrika pada akhir abad kesembilan belas (Lake, D. A. 2001).

Seringkali konsep imperialisme menggunakan alat politik untuk mengubah tatanan politik, ekonomi, kebudayaan bahkan kebiasaan lama dari entitas politik sebelumnya menjadi suatu hal yang baru atau mengadopsi tatanan dari negara penguasa/pengganti. Imperialisme berimplikasi pada hilangnya otoritas politik dari penguasa sebelumnya dan menyerahkannya pada penguasa baru. Hal ini membuat seringkali penguasa baru mencoba menata ulang sistem birokrasi pemerintahan, kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berasal dari entitas lama tersebut. Tujuan dari pembentukan ulang ini beragam, ada yang

dimaksudkan untuk menghapus memori-memori peninggalan kekuasaan lama sehingga tidak menimbulkan pemberontakan hingga ambisi untuk menyebarluaskan nilai-nilai yang dimiliki oleh negara penguasa baru tersebut.

Relevansi konsep imperialisme dalam penelitian ini adalah membantu mengungkapkan motif politik yang ingin dicapai Siam dalam menguasai dan merubah Kerajaan Patani. Konsep imperialisme memberikan petunjuk bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan Siam terhadap Patani salah satunya dalam bentuk perjanjian-perjanjian merupakan bentuk keinginan Siam dalam memperluas pengaruh dan memproklamkan daerah kekuasaannya secara internasional. Selain itu, konsep ini ikut serta menjelaskan bagaimana kemudian impikasi yang ditimbulkan dari praktek perjanjian imperialisme memberikan sebuah perubahan pada tatanan politik suatu wilayah berdaulat.

1.6 Argumen Utama

Implikasi politik perjanjian Anglo-Siam tahun 1909 terhadap wilayah-wilayah di Thailand Selatan akibat dari bentuk imperialisme Pericentric dari Siam terhadap Patani meliputi :

- Hilangnya eksistensi politik dari kerajaan Patani Besar atas wilayahnya sendiri
- Terbaginya wilayah Patani Besar menjadi wilayah milik Siam dan Koloni Inggris
- Munculnya pengakuan secara *de jure* dari kekuasaan Siam dan Inggris atas wilayah-wilayah kekuasaan mereka masing-masing termasuk wilayah yang sebelumnya merupakan kerajaan Patani
- Perubahan kebijakan-kebijakan kerajaan Patani menjadi kebijakan-kebijakan Siam baik dalam aspek politik, sosial dan budaya. Hal ini untuk menekan aksi pemberontakan dari masyarakat penduduk asli Patani yang menolak kekuasaan Siam yang akhirnya berlarut-larut hingga sekarang.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian sejarah berkaitan dengan prosedur penelitian ilmiah yang ditempuh berdasarkan pengelolaan peristiwa yang telah terjadi. Penelitian dalam sejarah berarti mengelola data dan fenomena yang telah terjadi di masa lampau. Metode itu sendiri dapat diartikan sebagai cara, jalan atau petunjuk teknik yang dilakukan dalam proses penelitian (Taufiqillah, 2017 : 6). Dalam penelitian sejarah keabsahan suatu data diolah dengan beberapa tahap. Tahapan ini dimaksudkan untuk menyaring dan mendapatkan data yang valid dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi kala itu. Maka, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi :

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Oleh karena sifat sejarah yang lampau maka data dari penelitian ini adalah berupa Penelitian Pustaka (*Library Research*). Hal ini berarti bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan fakta penggunaan data sekunder. Data-data sekunder ini diperoleh dari tulisan-tulisan sejarah dan berita yang terjadi di lapangan sehingga data tersebut dapat diperoleh dari sumber buku dan hikayat sejarah, internet, berita, surat kabar dan tulisan ilmiah dari berbagai penulis.

1.7.2 Metode Analisis Data

Sistem analisis data sejarah yang beresonansi pada fenomena yang terjadi saat ini membutuhkan beberapa tahapan analisa hubungan sebab-akibat, sehingga penulis menggunakan metode analisis yang meliputi :

1. Heuristik

Tahap ini merupakan kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Oleh karena penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, maka sumber yang diperlukan dapat berupa buku dan sebagai tambahan referensi peneliti menggunakan arsip, jurnal dan sumber internet.

2. Verifikasi

Tujuan utama kritik sumber adalah untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta. Kritik disini berarti bahwa setiap data yang ditemukan memerlukan proses cek ulang menggunakan data pembanding yang lain. Kritik

tersebut meliputi kritik internal dan eksternal. Kritik internal bertujuan untuk mengetahui kebenaran data yang dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber yang ada. Informasi yang paling banyak menyebutkan nilai yang sama kemudian diyakini sebagai sumber yang lebih dapat dipercaya. Tujuan kritik eksternal adalah untuk mengetahui keaslian data lewat nilai dan pandangan subjektif individu. Data dalam bentuk ini dapat berupa pengalaman pribadi, wawasan ataupun fenomena yang masih tersisa. Kemudian data-data ini dicocokkan dan dibandingkan dengan data-data yang lain sampai menemukan titik temu yang hampir sama nilainya untuk disepakati.

3. Interpretasi

Setelah fakta untuk mengungkap dan membahas masalah yang diteliti cukup memadai, maka tahap selanjutnya adalah interspetasi. Interpretasi sendiri memiliki arti sebuah penafsiran akan makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain. Dalam penafsiran atas fakta ini tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai peneliti akan turut andil dalam menyusun penelitian. Kemudian penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam bentuk penelitian kualitatif.

4. Historiografi

Historiografi adalah penyampaian sintesis yang dihadapkan dalam bentuk kisah atau penulisan yang dilakukan setelah melalui tahap heuristik, kritik sumber dan interspetasi. Historiografi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan sistematika yang telah dibuat oleh penulis. Setiap pembahasan akan ditempuh melalui bentuk deskripsi dan analisis dengan selalu memperhatikan aspek kronologis dari suatu peristiwa terhadap hubungannya dengan sumber data.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan dan landasan teori serta metode yang akan digunakan dalam penelitian

Bab II Sejarah Peradaban Kerajaan Patani

Berisi pendalaman tentang identitas kerajaan Patani beserta bukti perjalanan sejarah yang mengiringinya sebagai bukti eksistensi keberadaan kerajaan Patani kala itu

Bab III Suksesi Kerajaan Siam dan Keterlibatan Inggris

Berisi sejarah konflik antara kerajaan Patani dan Siam serta permasalahan yang dihadapi pasca Inggris masuk

Bab IV Implikasi Dari Perjanjian Anglo-Siam Tahun 1909 Terhadap Wilayah-Wilayah Di Thailand Selatan

Berisi implikasi yang terjadi akibat terbentuknya perjanjian anglo-siam utamanya pada praktek-praktek kehidupan masyarakat Patani asli pasca perjanjian itu dan status kedaulatan wilayah patani.

Bab V Kesimpulan

Berisi kesimpulan dan saran yang membangun untuk studi lanjutan dari masalah ini

BAB 2

SEJARAH PERADABAN KERAJAAN PATANI

2.1 Bukti Sejarah Kerajaan Patani

Negeri Patani mempunyai sejarah yang lama. Sejarah lama Patani adalah merujuk kepada kerajaan Melayu tua pengaruh India – Langkasuka. Seorang sejarawan bidang Manusia dan Sosial di Prince of Songkhla University di Patani, Seni Madakakul berpendapat bahwa Langkasuka terletak di daerah Patani, Yala, Narathiwat dan sebagian Kedah dan Perlis. Pendapat ini disokong oleh beberapa orang sejarawan lain seperti Prof.Zainal Abidin Wahid, Mubin Shepard, Prof.Hall dan Prof.Paul Wheatly. Patani yang dimaksudkan dalam tulisan ini bukan wilayah atau “Changwad (Provinsi) Pattani” sebagaimana yang saat ini terletak dalam peta negara Thailand, tetapi lebih merujuk kepada sebuah negara yang lebih luas, yaitu meliputi wilayah-wilayah Narathiwat, Yala dan sebagian daripada Songkhla (daerah-daerah sebayor dan tabor). Ahli pengkaji sejarah manusia telah mengesahkan bahwa bangsa yang mula-mula bermukim di tanah Melayu ini adalah dari suku Jawa dan Melayu yang kemudian memiliki orang-orang Melayu di Patani Selatan Thailand sekarang. Bahkan, dalam satu catatan mengenai sejarah kerajaan Siam yang masuk ke tanah Melayu disebutkan bahwa orang-orang Arab dan India dikatakan telah masuk dan bemukim di daerah ini dan berhubungan dengan suku Jawa dan suku melayu ini sebelumnya (Al-Fatani, 1994 : 48). Kepercayaan yang mengatakan bahwa suku Javanece-Malay ini menjadi nenek moyang dari orang melayu Patani kini disahkan oleh seorang pakar Sejarah Thai, Prof.Praya Anuman Rajathon dan disokong oleh bekas Perdana Menteri Thai, Kukrit Pramroj dalam sebuah tulisannya di Akhbar Harian Thai “Siam Rath” pada tanggal 31 Agustus 1975.

Tanah melayu telah didatangi oleh pedagang-pedagang Arab, India dan Cina Sejak sebelum masehi. Buku-buku catatan pedagang menyebutkan bahwa kerajaan tua yang terdapat di tanah Melayu ialah Langkasuka. Catatan pedagang

Cina menyebutkan bahwa sewaktu beliau datang ke Langkasuka pada tahun 200 M, ia mendapati negeri itu telah lama berdiri, selain dari itu dalam sebuah catatan sejarah Cina yang ditulis pada zaman kerajaan Liang (502-566 M.), disebutkan bahwa negeri Langkasuka dibuka pada penghujung abad masehi yang pertama (kemungkinan antara tahun 80- 100 M) (Al-Fatani, 1994 : 16).

2.1.1 Periode Kerajaan Langkasuka

Letak kerajaan Langkasuka berada di antara Siam dan Kelantan. Menurut Lang-Ya-hsiu sebuah catatan Cina menyebutkan bahwa : “kerajaan Langkasuka terletak di laut selatan, mempunyai daerah yang luas yaitu dari timur ke barat memakan masa 30 hari berjalan kaki, dan dari utara ke selatan 20 hari berjalan kaki”. Sedangkan buku sejarah negeri Kedah, Hikayat Merung Maha Wangsa menyebutkan bahwa negeri Langkasuka terbagi pada 2 bagian yaitu terletak di negeri Kedah di kawasan tebing sungai Merbuk sedangkan bagian kedua terletak di sebelah timur Kedah yaitu di kawasan pantai laut Cina Selatan. Dalam beberapa sumber inilah menjadi dasar Prof.Paul Whaetly mengatakan bahwa Langkasuka terletak di Patani sekarang. Pendapat ini disokong oleh Prof.Pearn, Prof Hall dan persatuan sejarah Kelantan. Sedangkan Seni Madakukul, dalam tulisannya “Sejarah Patani Purya. dimana negeri Langkasuka?” Naskhah rusembilan (Universitas Songkhla Nakarin, 1975) menjelaskan bahwa dalam sejarah Cina pada abad pertama dan kedua masehi ada disebutkan nama-nama negeri Kedah dan Langkasuka. Bukti ini meyakinkan beliau bahwa Kedah dan Langkasuka adalah dua buah negeri tetangga.

Kepercayaan Era Kerajaan Langkasuka adalah menganut kepercayaan Hindu. Dalam tahun 450 M, seorang ahli pengembara Cina mencatat bahwa di Patani (Langkasuka) beliau menemui beberapa orang kaum Brahmin dari India yang tinggal di istana raja. Bukti ini mengesahkan bahwa agama Hindu Brahma hendak bertapa di Patani pada tahun sebelum 450 M. Prof.Hall menyatakan bahwa dalam tahun 515 M. raja Langkasuka dikenal dengan nama Bhaga Datta yaitu suatu nama dalam bahasa sansekerta yang berarti “pembawa kuasa” nama ini memberi kesan jelas pengaruh india dan hindu di Langkasuka.

Mengenai adat istiadat penduduk Kerajaan Langkasuka terlihat pada pakaian khas yang dikenakan. Sejarah Cina pada abad dinasti Liang menyebut bahwa penduduk Langkasuka gundol dan mereka memakai pakaian yang ditenun dari kapas dan baju tanpa lengan. Transportasi penduduknya selalu membuat kunjungan kemana-mana dengan menggunakan gajah yang dipandu oleh seorang gembala kemudian hamba rakyat berbaris memanjang mengiringi membawa panji-panji dan mokul gandang (Universitas Songkhla Nakarin, 1975 : 63).

Setelah itu, Kerajaan Langkasuka berganti pada agama Budha. Pada saat kerajaan Sriwijaya berjaya dan menaklukan Nakonsitamarat pada 775 M kemudian Sriwijaya mengembangkan kekuasaan mereka ke Selatan (Patani) sehingga mulai penduduk Patani/Langkasuka meninggalkan agama Hindu dan memeluk agama Budha (Al-Fatani, 1994 : 36). Beberapa sejarawan bahwa Kerajaan Sriwijaya yang telah mengembangkan bahasa Melayu ke Patani. Sebuah berhala Budha zaman Sriwijaya yang ditemukan dalam gua (wad tham) di daerah Yala membuktikan bahwa perpindahan agama dari Hindu ke Budha ini, meskipun tulisan-tulisan artefak ini telah banyak yang musnah saat orang Patani kemudian menganut Islam. Bahasa Melayu-Sansekeru dan agama Budha yang dibawa oleh Sriwijaya sangat mempengaruhi orang Patani, berawal dari kekuasaan Sriwijaya inilah Patani mulai berkembang maju dan mencapai kemajuannya, menyebabkan Patani menjadi lebih terkenal dari zaman sebelumnya.

Menurut Seni Madakakul, Langkasuka mulai mencapai zaman majunya pada tahun 800 M. Sekitar tahun itu, kerajaan Sriwijaya di Palembang bekerjasama dengan kerajaan Sailendra di Jawa lalu membentuk wilayah besar menjadi suatu kuasa besar manaklukan bukan saja nusantara tapi juga termasuk Indo-Cina. Raja Sailendra telah memilih Langkasuka sebagai pusat pemerintahannya di tanah Melayu. Sedangkan Pemerintahan Sriwijaya di Patani dijalankan tanpa kekuasaan tentara dan birokrasi, tetapi dengan menggunakan kekuasaan laut dan perniagaan melalui penguasaan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai. Kekuasaan Langkasuka berada “ditangan” seorang raja yang harus menghantar upeti kepada Kerajaan Sriwijaya di Palembang selaku pihak

yang menguasai urusan luar negeri di tingkat pusat. Hasil negeri Langkasuka pada masa itu banyak berupa hasil pertanian dan perniagaan, beberapa pengetahuan bernilai seperti teknik membajak dan berladang diterima oleh orang patani daripada orang jawa (Al-Fatani, 1994 : 37). I Tsing, seorang pengembara Cina yang terkenal, menyatakan bahwa kebudayaan Melayu Budha di kepulauan Indonesia sudah maju, terutama pada abad ke - 6 M. Kebudayaan ini dipercayai dibawa masuk ke Patani melalui bahasa Melayu, agama Budha, ilmu pelayaran, seni pendidikan, musik dan peralatan raja. Prof.Hall menggambarkan relief kapal-kapal layar zaman Sriwijaya mempunyai bentuk seni tersendiri dengan cat warna warni dan diselingi dengan ukiran yang halus, apabila kenyataan ini dihubungkan dengan bentuk perahu kolik Kelantan dan Patani sekarang.

2.1.2 Periode Kerajaan Patani

Berdasarkan pada buku Hikayat Patani (Teeuw dan David, 1970 : 19) pengertian negeri Patani ialah berasal dari penamaan yang dilakukan oleh Phya Tu Nakpa. Beliau merupakan nama dari putra Phya Tu Krup Mahajana yang memerintah di suatu tempat yang bernama “kota Mahligai” yang dahulunya peninggalan dari kerajaan Langkasuka. Oleh karena kota Mahligai ini letaknya jauh dari pantai, hal ini menyebabkan kesulitan yang dialami oleh pedagang-pedagang dari negeri luar untuk singgah, akibatnya perniagaan dalam negeri menjadi tidak berkembang. Hal ini kemudian menyebabkan rakyat dalam negeri kota Mahligai keluar mencari penghidupan di luar kota Mahligai dan akhirnya jumlah penduduk semakin berkurang. Pada suatu hari, Phya Tu Nakpa pergi berburu ke hutan yang berujung pada penemuan sebuah pantai, pada pantai itu terdapat sebuah pondok yang didiami oleh dua orang tua, salah seorang daripadanya bernama Pak tani. Sang baginda mendapatkan kawasan tepi laut itu sangat sesuai dijadikan negeri untuk menggantikan negerinya yang terletak jauh di darat. Maka ia pun memerintahkan supaya dipindahkan saja “kota Mahligai” ke tempat Pak tani tersebut. yang baginda temui itu. Kemudian akhirnya disebut sebagai patani.

Menurut sejarah kerajaan Melayu Patani, menyebutkan bahwa kampung Pak Tani ini dahulunya terletak di sekitar kampung yang dinamakan Kerisik sekarang. Setelah Phya Tu Nakpa berpindah ke Patani, kampung ini menjadi lebih ramai dan menjadi tempat baru yang makmur dengan perdagangan. Phya Tu Nakpa kemudian memerintahkan untuk dipindahkan pusat pemerintahan kota Mahligai ke kampung Pak Tani ini yang saat ini berada di daerah kerisik. Semenjak itu orang-orang Patani membangun negerinya dengan kuat dan semakin besar sampai Phya Tu Nakpa mengangkat putranya yang bernama “Intira” untuk mengambil alih takhta kerajaan (Al-Fatani, 1994 : 68).

2.2 Asal Mula Kerajaan Patani Memeluk Islam

Terdapat suatu cerita menarik mengenai bagaimana raja Patani memeluk Islam. Hikayat patani (Teeuw dan David, 1970 : 18) menceritakan bahwa pada suatu ketika raja Patani sedang sakit. Beliau diobati oleh segala dukun istana tetapi tidak juga sembuh akhirnya ada seorang tabib Sheikh Said berasal dari Kerajaan Samudera Pasai menyanggupi untuk mengobati raja tetapi ada syaratnya, syarat tersebut yaitu apabila sembuh nanti raja harus memeluk agama Islam. Syarat itu diterima oleh raja tetapi saat kemudian raja Patani benar sembuh baginda raja ini ternyata tidak menepati janjinya, hasilnya beberapa tahun kemudian penyakitnya kambuh kembali. Kemudian tabib dari Kerajaan Samudera Pasai itu datang kembali untuk mengobati penyakit baginda dengan syarat yang sama seperti dahulu, namun setelah sembuh baginda tetap mengingkari janjinya yang akhirnya penyakit itu menyerang lagi untuk ketiga kalinya. Setelah baginda sembuh ketiga kalinya dari penyakitnya oleh tabib Sheikh itu, barulah baginda bersama keluarga dan pegawai istana memeluk Islam. Semenjak itu mulailah berkembang agama Islam di Patani.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai nama raja Patani yang pertama memeluk Islam. Hikayat patani (Teeuw dan David, 1970 : 14) menyebutkan bahwa Phya Tu Nakpa, yaitu raja yang membuka negeri patani lalu menukar namanya menjadi “Sultan Ismail Syah” adalah raja pertama yang masuk Islam, sementara buku sejarah kerajaan melayu patani menyebutkan raja Intira (putra

dari raja Phya Tu Nakpa) yang berganti nama menjadi “Sultan Muhammad Syah” adalah raja yang pertama masuk Islam (sejarah kerajaan Melayu Patani). Meskipun begitu kemudian cerita berlanjut sama pada pelantikan Syeikh Said sebagai guru agama Islam di dalam istana dan diberi gelaran “Datuk seri raja Faqih” yang segera kemudiannya diikuti oleh para pembesar kerajaan. Hal ini membuat pengaruh Hindu-Budha mulai berkurang dan akhirnya hilang dari Patani. Pada masa ini patung-patung Hindu-Budha dipercayai telah dimusnahkan (Al-Fatani, 1994 : 70).

Syeikh Muhammad atau Ismail Syah telah mengadakan hubungan dengan kerajaan Malaka dan Siam. Utusan raja Patani ke Malaka telah berlangsung tahun 1488 hingga tahun 1511 demikian juga dengan hubungan ke kerajaan Ayutaya (Siam). Bagi Pada waktu itu, Patani sudah mampu menarik perhatian saudagar-saudagar timur seperti Jepang, Cina, Siam dan kepulauan-kepulauan Melayu. Pelabuhan Patani mulai ramai dan perniagaannya bertambah maju, ekonomi Patani mulai bangkit dan besar (Teeuw dan David, 1970 : 21). Pada tahun 1511 Malaka jatuh “ketangan” Portugis, sejak itu mulai saudagar dari Eropa datang ke Melayu, termasuk ke kawasan Patani pada tahun 1516. Patani menerima kunjungan kapal perniagaan Portugis yang pertama dan memperoleh izin dari sultan untuk membuka gedung perniagaan di Patani. Hal ini jejak awal mengenai perniagaan bangsa Eropa di Patani (Menurut seorang ahli perniagaan portugis (Pinto) yang menulis pada tahun 1538). Sultan Muhammad Syah meninggal dan meninggalkan dengan dua orang putra yaitu : raja Muzaffar dan raja Mansur serta seorang putri bernama raja Aisyah. Raja Muzaffar telah dipersetujui oleh karabat diraja untuk menggantikan ayahnya dengan memakai gelar sultan Muzaffar Syah manakala adiknya raja Mansur dilantik menjadi pangeran.

2.2.1 Periode Kepemimpinan Sultan Muzaffar Syah

Sultan Muzaffar telah melakukan lawatan keluar negeri bertujuan mengikat tali persahabatan dan mengeratkan hubungan antar Negara. Beliau telah melawat ke negeri Siam untuk menjalin persahabatan dengan rajanya. Karena menurut beliau, Siam adalah negara jiran yang terdekat. Namun, disaat pangeran

Mansur yang diberikan perintah untuk melakukan kunjungan ke Siam itu ternyata kunjungan itu tidak diterima dengan selayaknya oleh raja Siam. Raja Siam merasa bahwa kedudukan kerajaan Siam lebih tinggi daripada Sultan Patani, walaupun begitu saat pangeran Mansur pulang, raja Siam sempat juga menghadihkan beberapa orang-orang tawanan Burma sebanyak 100 orang dan seorang gadis Siam kepada baginda. Para tawanan tersebut ditempatkan di sebuah perkampungan khas di Patani. Oleh sebab mereka masih beragama Budha, maka mereka telah membangun rumah ibadah mereka disitu yang dinamakan Kedi (Rumah Sami). Kampung Kedi ini masih terwujud sampai sekarang di Patani dan dikenal dalam bahasa Thai dengan nama Ban Di. Kesan yang tidak baik sepatut yang diterima baginda daripada raja Siam ini telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam jiwa baginda Sultan Muzaffar Syah. Pada saat Burma menyerang Siam pada tahun 1563 baginda telah menerima berita ini dengan gembira, baginda menyiapkan untuk membalas kesombongan raja Siam terhadap baginda dengan cara menyerang Siam pada saat genting ini (Al-Fatani, 1994 : 83).

Kemudian penyerangan dimulai dengan dipimpin oleh pangeran Mansur dan angkatan baginda kepada Siam. Setibanya di Ayuthaya, serangan tentara raja Muzaffar yang dilancarkan pada waktu malam ini telah berhasil menawan istana raja Siam. Peristiwa ini berlaku pada tahun 1563, yaitu saat Siam diperintah oleh Phra Maha Cak Kapat, bagaimanapun raja Siam dapat melarikan diri melalui sebuah Chong Riraja dan kemudian dapat menawan kembali istananya. Dalam hikayat patani di kisahkan bahwa saat sedang berperang itu baginda telah menyuruh adik baginda pangeran Mansyur pulang terlebih dahulu dengan meninggalkan lebih kurang 1,500 orang tentara saja untuknya. Kembalinya Mansur ke Patani namun ia tidak mendengar berita mengenai kakaknya bahwa raja Muzaffar sebenarnya telah secara mengejutkan menyerang Siam di kuala sungai Chau Praya dan akhirnya gugur serta dikebumikan di kuala sungai negeri Siam itu (Teeuw dan David, 1970 : 45). Akhirnya keputusan musyawarah keluarga diraja dan pembesar negeri keluar. Keputusannya adalah memilih adik baginda raja Mansur menjadi Sultan manakala almarhum sultan Muzaffar meninggal.

2.2.2 Perebutan Tahta Dalam Kerajaan Patani

Sultan Mansur Syah memerintah Patani antara tahun 1564 hingga tahun 1572. Baginda meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan dua orang putra yaitu raja Bahadur dan raja Bima (anak dari selir) dan seorang putri raja Aisyah. Namun, raja Mansur sempat berwasiat supaya anak dari kakaknya yaitu anak sultan Muzaffar Syah yaitu "Patik Siam" dilantik sebagai pengantinya. Wasiat ini akhirnya dilaksanakan oleh keluarga diraja dan pembesar negeri dan kemudian Patik Siam diangkat sebagai sultan dengan memakai gelar "Sultan Patik Siam". Pada waktu Patik Siam dilantik menjadi sultan beliau baru berusia 9 tahun dan oleh karena itu pemerintahannya telah dijalankan oleh bibinya yaitu raja Aisyah (anak perempuan raja Mansur. Pelantikan raja Patik Siam sebagai sultan telah menimbulkan rasa tidak senang kepada raja Bima saudaranya dari kuturunannya dari para selir. Hal ini didorong oleh rasa amarah yang amat sangat pada suatu pagi menjelang waktu subuh ketika sultan Patik Siam sedang berada di kamarnya, raja Bima masuk dan dengan sebilah keris membunuh sultan Patik Siam yang baru berusia 10 tahun. Selain itu raja Aisyah ikut terbunuh dalam peristiwa tragis itu (Al-Fatani, 1994 : 56). Kemudian Raja Bima melarikan diri dari istana.

Dengan peristiwa pembunuhan Sultan Patik Siam akhirnya istana Patani digantikan oleh raja Bahadur (anak sultan Mansur) Bahadur naik takhta pada 1573. Pemerintahannya juga berakhir dengan peristiwa berdarah saat baginda dibunuh oleh saudara lelakinya yaitu raja Bima. Pembunuhan ini terjadi akibat suatu perselisihan paham antara baginda dengan raja Bima, raja Bima akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Raja Bahadur telah meninggalkan keturunannya yaitu semua anak-anak perempuan yaitu raja Hijau, raja Biru dan raja Unggu (Al-Fatani, 1994 : 88). Ketiga orang putri ini ditakdirkan akan memainkan peranannya yang sangat penting dalam sejarah negeri patani. Di bawah tiga orang putri ini Patani menikmati zaman gemilangnya pada akhir abad ke-16 dan separuh bagian pertama abad ke-17.

2.3 Sejarah Kepemimpin Kerajaan Patani Era Ratu-Ratu

2.3.1 Era Kepemimpinan Raja Hijau (1584-1616)

Bermula dengan raja Hijau yang naik takhta pada 1584. Negeri patani berturut-turut diperintah oleh empat orang raja perempuan. Zaman ini yang dikenal dalam sejarah Patani dengan nama “zaman ratu-ratu”. Berlangsung lebih setengah abad sebelum raja perempuan Patani yang terakhir yaitu raja kuning wafat pada tahun 1651, di bawah pemerintahan ratu-ratu berempat ini negeri Patani menikmati zaman emasnya yang jaya. Raja Hijau menjadi raja pertama pada waktu bangsa Barat sudah mulai meluaskan perdagangannya ke dunia timur. Pada waktu ini Portugis sudah mengalahkan kerajaan Malaka dan Spanyol mulai datang di Filipina terutamanya di Luzon. Seperti kerajaan-kerajaan Melayu yang lain sekitar awal abad ke-17, negeri Patani mulai terganggu oleh pengaruh dan kontak dengan Negara asing yang kesannya bukan saja mendatangkan kemakmuran tetapi juga implikasi politik yang berkepanjangan terutamanya dengan Siam, Jepang dan Belanda. Pada tahun 1602 Raja Hijau memberikan ijin kepada orang Belanda mendirikan pusat perdagangan mereka di Patani dan sebelum itu sejak 1592 sudah terbentuk hubungan dagang secara resmi di antara Patani dengan Jepang (Teeuw dan David, 1970 : 32), pada tahun 1605 bangsa Spanyol juga datang berniaga di Patani dan kemudian pada tahun 1612 satu lagi perjanjian dagang kali ini dengan Inggris.

Raja Hijau memerintah patani hingga 1616. Pada zaman raja Hijau ini Patani mulai diancam oleh Siam. Percobaan pertama Siam kepada Patani terjadi pada tahun 1603 (Al-Fatani, 1994 : 89). Serangan pertama ini dapat dipatahkan namun demikian sepanjang abad ke-17 hubungan Patani dengan Siam ibarat hubungan ayam dengan musang. Politik Patani pada waktu itu sangat pasang surut dengan Siam, namun juga memiliki hubungan yang baik dengan negeri-negeri Melayu berjiran lainya seperti Kedah, Kelantan, Terangganu dan Johor. Konflik perbatasan dengan Siam sering terjadi misalnya saat suatu ketika Raja Hijau ingin menggali sungai untuk tujuan pengairan kepada rakyatnya pada masa pemerintahannya, Siam membendung aliran air dan menggantinya dengan aliran

air laut. Akibatnya air sungai kerisik hampir tidak berguna karena dimasukan air asin. Akhirnya baginda mengarahkan rakyat supaya membuat satu terusan yang bermuara disungai kerisik dan berakhir disungai temangan (dekat kampung perigi sekarang) agar mencairkan air dari sungai patani mengalir kelaut melalui sungai kerisik dengan demikian air dari sungai kerisik menjadi tawar dan sawah dapat menghasilkan panennya. Raja Hijau wafat pada tahun 1616 dalam usia 63 tahun.

2.3.2 Era Kepemimpinan Raja Biru (1616-1624)

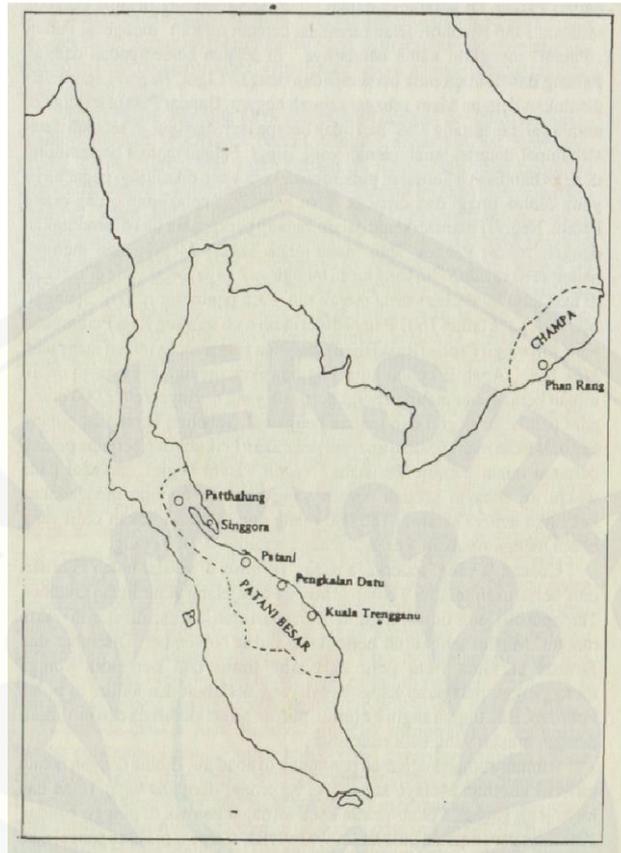
Adik raja Hijau, Raja Biru memerintah Patani setelah berusia 50 tahun. Selama menghadapi ancaman Siam yang sentiasa menghantui Patani, raja Biru bekerjasama dengan sultan Kelantan yaitu sultan Abdulqadir untuk membentuk suatu gabungan negara persekutuan Patani yang besar dan mewujudkan suatu pasukan tentara yang kuat untuk menghadapi Siam (Al-Fatani,1994 : 89). Utusan pertama raja Patani ke istana Kelantan pada tahun 1616 gagal mendapat jawaban positif daripada pihak Kelantan, demikian juga dengan kunjungan langsung raja Biru sendiri ke Kelantan pada sekitar awal tahun 1617. Akhirnya pada kunjungan kali keduanya ke Kelantan pada tahun 1618, baginda raja Biru mendapatkan persetujuan “bersyarat” daripada sultan Kelantan untuk bekerjasama namun demikian persekutuan ini tidak segera menjadi kenyataan sampai tahun 1619 dan berlangsung terus selama 131 tahun yaitu hingga tahun 1750. Raja Biru meninggal pada tahun 1624. Baginda dikenal dengan nama Marhum Tengah.

2.3.3 Era Kepemimpinan Raja Ungu (1624 - 1635)

Baginda ialah adik Raja Biru dan bekas permaisuri kerajaan Pahang. Baginda pulang ke Patani selepas berada di Pahang selama 30 tahun dan wafatnya suaminya yaitu Sultan Abdul Ghafur pada tahun 1614. Raja Biru dianggap raja perempuan Patani yang paling handal dan ambisius. Hal ini dibuktikan dengan tidak sampai satu dekade Patani sempat terlibat dalam dua kali peperangan besar dengan musuh tradisinya yaitu Siam. Kali pertama pada tahun 1632 dan kedua kali pada tahun 1633 hingga tahun 1634. Walaupun dengan mendapat bantuan dan kerja sama dari Belanda di Bangkok dan Jakarta, namun Siam gagal merebut Patani dalam dua kali peperangan yang diperkirakan cukup besar ini. Pertahanan

ibu kota Patani pada zaman Raja Ungu unggul sekali. Manakala itu, ibu kota Patani sendiri dilindungi suatu benteng yang terkenal dengan gelaran "Benteng Raja Biru" untuk menghadapi serangan Siam, Raja Ungu telah mengerahkan sejumlah 23.000 orang tentara ditambah dengan bantuan dari Kelantan, Pahang dan Johor sehingga total angkatan ini berjumlah 30,000 orang semuanya (Al-Fatani, 1994 : 96). Dengan upaya seperti ini, dua kali serangan Siam di atas dapat diatasi.

Dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 1636, Siam sekali lagi merancang akan melancarkan serangan keatas Patani. Kali ini juga dengan janji kerjasama dan bantuan daripada Belanda. Bagaimanapun, perancangan ini dibatalkan akibat campur tangan Sultan Rijaluddin Muhammad Shah (1612-1652) dari Kedah dan ramalan sami Budha yang mengatakan bahawa jika serangan dilancarkan, Siam tetap kalah dan justru lebih buruk lagi. Usaha-usaha diplomatik diambil bagi mendamaikan Patani-Siam. Satu utusan Siam tiba di istana Patani pada tahun 1636 untuk *me-lobby* raja Patani yang baru yaitu Raja Kuning supaya meminta maaf kepada kerajaan Siam serta menyambung hubungan baik semula yang telah lama tertangguh sejak pada zaman Raja Ungu (Al-Fatani,1994 : 97). Walaupun pihak Patani bersikeras dan bersikap enggan pada permintaan awal itu, tetapi atas nasihat Belanda, ratu Patani setuju untuk melakukan perdamaian pada bulan Agustus tahun 1636. Satu persetujuan dicapai saat Patani setuju meneruskan pengiriman upeti emas kepada Siam, sedangkan pihak Siam setuju melantik seorang utusanya bertaraf duta di Patani sebagai tanda persahabatan antara kedua negara.



Gambar 1.0.1 Peta Wilayah Kerajaan Patani Besar
Sumber : (Al-Fatani. 1994. PENGANTAR SEJARAH PATANI : 49)

2.3.4 Era Kepemimpinan Raja Kuning (1635-1651)

Raja Kuning menggantikan Raja Ungu setelah wafat pada tahun 1635. Raja Ungu wafat dengan meninggalkan negeri Patani dalam suatu keadaan yang "damai sementara" dalam hubungannya dengan raja Siam Prasat Thong. Baginda digantikan oleh anaknya daripada perkawinannya dengan Sultan Abdul Ghofur Pahang. Pada zaman Raja Kuning, satu lagi peperangan terjadi di antara Patani-Siam. Peperangan ini terjadi pada tahun 1638 dan merupakan peperangan kali keempat di antara kedua negara sejak 1603. Menurut (Shukri, 1985 : 44), hampir tidak ada sumber lain yang menyebut peristiwa peperangan Patani-Siam pada kali ini. Peperangan pada kali ini tidak sebesar peperangan pada tahun-tahun 1632 hingga tahun 1634 dan lebih merupakan *gimmick* politik raja Siam yang baru mengambil alih tahta pada tahun 1641. Namun untuk menghentikan peperangan

itu Baginda raja Kuning berberkunjung ke Ayuthaya untuk memperbaharui hubungan antara Patani-Siam selepas peristiwa ini. Patani aman selama beberapa waktu tanpa diganggu oleh Siam, sambil menikmati zaman emasnya serta menjadi sebuah negara yang sangat berpengaruh di antara kerajaan negeri-negeri Melayu pada waktu itu.

Raja Kuning bersuamikan Yang Di Pertuan Muda Johor, adinda bongsu kepada Sultan Abdul Jalil Shah III (Sultan Johor 1623-1677). Perkawinan ini berlangsung di Patani pada tahun 1632, tidak lama selepas peperangan Patani-Siam. Baginda adalah seorang yang kaya dan mempunyai sifat-sifat seorang raja yang bertanggungjawab terhadap rakyat dan negaranya. Baginda disebut mempunyai minat yang tinggi dalam perniagaan dan dikatakan memiliki kapal-kapal dagangnya sendiri yang berdagang di rantau alam Melayu di bawah kendali seorang yang bergelar "saudagar raja". Atas inisiatif Baginda, satu pasukan secara besar-besaran di kerahkan Sungai Patani yang dipercayai sebagai usaha yang diambil sehubungan dengan kapal-kapal dagang baginda yang keluar masuk melalui kuala sungai tersebut. Selain itu kegiatan berdagang, Raja Kuning juga dilaporkan gemar bercocok tanam, meskipun selama masa baginda menjadi pemerintah kerajaan itu tiada pernah baginda menggunakan uang hasil berdagangnya walaupun baginda berhak menggunakan uang itu. Baginda hanya menggunakan hasil uang cocok tanamnya untuk makan sehari-hari (Shukri, 1985 : 98).

Raja Kuning terlibat dalam hubungan "tidak mesra" dengan Raja Sakti I, Datu Kelantan yang memerintah di Kota Pangkalan Datu. Menurut riwayat sejarah Kelantan dipercayai, hubungan seperti ini merupakan wujud kekecewaan Raja Sakti I terhadap Raja Kuning yang tidak mengambil tindakan apa-apa atas saudara Raja Sakti I yang merebut haknya atas takhta kedatuan Kelantan seperti yang diturunkan dalam sejarah Kelantan (Shukri, 1985). Ayah Raja Sakti I, Datu Abdul Kadir (sebelumnya bernama Sultan Abdul Kadir) meninggal pada tahun 1632. Baginda sepatutnya digantikan oleh anaknya yaitu Raja Sakti I, tetapi segera setelah Sultan Abdul Kadir meninggal justru saudaranya, Raja Abdullah yang bertindak secara sewenang-wenang menaiki takhta kedatuan Kelantan dan

melepaskan hubungan Kelantan daripada Patani. Akibatnya gelar "sultan" dan pemerintahan seperti ini seolah-olah meletakkan kuasa politik Kelantan kepada dua bagian yaitu : sebagian mengakui Raja Abdullah sebagai "sultan" dan sebagian yang lain mengakui Raja Sakti I sebagai Datu Kelantan yang sah. Berdasarkan riwayat sejarah Kelantan, Raja Abdullah berkuasa mulai kawasan Melor dan Kota Jelasin terus ke ulu, sedangkan Raja Sakti I berkuasa di sekitar Kota Pangkalan Datu dan kawasan hilir serta seluruh kawasan Kelantan barat. Sejak zaman bundanya, Raja Ungu, kedua calon sultan ini tidak ditentukan sebagai wakil-wakil pemerintahan Kelantan yang jelas, meskipun pada tahun 1638 ratu Patani yang baru, Raja Kuning memberikan pengakuan bersuratnya kepada Raja Sakti I sebagai Datu Kelantan yang sah, namun "Sultan Abdullah" memerintah di Kelantan sehingga di saat Sultan Abdullah meninggal pada tahun 1646, tempat baginda itu segera digantikan oleh anaknya Raja Abdul Rahim dengan gelaran Sultan Rahim yang memerintah Kelantan di dalam kawasannya dengan sangat zalim (Al-Fatani,1994 : 121).

Pada masa ini, Raja Sakti I dan masyarakat Kelantan umumnya sedang menunggu-nunggu apakah tindakan yang bakal diambil oleh Raja Kuning selaku pemerintah pusat di Patani, terhadap perlakuan zalim Sultan Abdul Rahim ini. Setelah lama menunggu dan ternyata Raja Kuning bersifat "lepas tangan" dalam perkara ini, Raja Sakti I mulai merasa bahawa Raja Kuning seolah-olah sengaja membiarkan negeri Kelantan berada dalam kondisi huru-hara walaupun tidak secara langsung menjerumuskannya ke dalam satu kancuh perang saudara. Raja Sakti I merasa bahwa jika sekiranya terjadi perang saudara antara baginda dengan Sultan Abdul Rahim, maka kerajaan pusat di Patani akan merasa sangat gembira oleh karena sejak zaman dahulu, Raja Ungu memang telah ada memiliki keinginan untuk menghapuskan keturunan raja di Kelantan yang lama dan menggantikannya dengan yang baru yang bersedia menerima semua perintah dari Patani. Selain itu dapat pula mengenakan bayaran dan cukai di Kelantan sebagaimana halnya dengan gabungan Kelantan ke dalam Patani pada pertama kali dahulu. Hal ini membuat Raja Sakti I mulai mengumpulkan tentara untuk memberontak di Patani. Tahap pertama ialah melancarkan perang penyatuan ke

Kelantan terlebih dahulu. Kira-kira pada akhir tahun 1649 baginda menyerang kota Mahligai (dekat Melor sekarang/tempat persemayaman Sultan Abdul Rahim). Pertempuran berlangsung hingga pagi dan berakhir dengan Sultan Abdul Rahim tewas ditikam Raja Sakti I. Dengan pembunuhan ini, Kelantan yang dahulunya dua wilayah kekuasaan kini kembali bersatu di dalam “gengaman” Raja Sakti I. Kemudian, baginda menyerang pusat kekuasaannya sendiri yaitu Patani dan menjatuhkan Raja Kuning. Selepas mengalahkan Patani, baginda berturut-turut merebut Senygora, Pathalung dan Legor. Raja Kuning turun dari takhta pada tahun 1651, lalu berangkat dengan para pengiringnya ke negeri suaminya di Johor. Pada saat di tengah pelayaran di laut, baginda jatuh sakit dan didaratkan di Kota Pangkalan Datu. Beberapa bulan kemudian, baginda meninggal di Kelantan dan dikebumikan di Kampung Pancor (Shukri, 1985 : 130). Makam baginda masih ada sampai sekarang dan dikenal dengan nama "Makam Nang Cayang”.

2.4 Situasi Patani Setelah Kepemimpinan Raja Kuning

Raja Kuning adalah raja perempuan Patani yang terakhir dari dinasti lama. Beliau turun takhta pada tahun 1651 seiring terjadinya serangan Raja Sakti I dari Kelantan ke atas kuasa pusatnya yaitu Patani. Meskipun demikian, Raja Sakti I tidak memerintah Patani, sebaliknya menyerahkan Patani kepada putera sulungnya, Raja Bahar yang memerintah hingga 1670. Bermula daripada ini, negeri Patani dipimpin oleh raja-raja dari Kelantan. Negeri yang dahulunya terletak di bawah pusat pemerintahan Patani sekarang berbalik menjadi pemerintah negeri Patani sendiri yang diperintah Kelantan. Sejarawan menamakan zaman ini dengan nama "zaman pemerintahan raja-raja Kelantan" atau "raja-raja Kelantan di Patani" (Shukri, 1985 : 132). Pada waktu tersebut, negeri Kelantan masih berstatus sebuah wilayah di dalam negara Patani Besar (negara persekutuan yang dibentuk pada tahun 1619 oleh Raja Biru Patani dan Sultan Abdul Kadir Kelantan). Ia berhasil mengalihkan kekuasaan di pusat, Raja Sakti I telah pula menggabungkan wilayah-wilayah taklukannya yang lain seperti Terengganu, Senggora dan Pathalung, menjadi sebuah persekutuan yang besar dalam upayanya

menahan serbuan dari Siam. Raja Sakti I wafat pada tahun 1692 akibat luka-luka karena terkena serpihan peluru meriam dalam pertempuran di laut Patani antara angkatan lautnya dengan angkatan laut Siam. Baginda digantikan oleh putera keduanya, Raja Omar. Kemudian Raja Omar memutuskan untuk mengembara dan menyerahkan takhta negara Patani Besar kepada adiknya Raja Bahar yang saat itu sedang menjadi raja pemerintah negeri Patani (Al-Fatani, 1994 : 92).

Dengan ini negara Patani Besar sekarang diperintah oleh Raja Bahar. Pada tahun 1670, Raja Bahar melepaskan takhta negara Patani Besar kepada permaisurinya, Raja Mas Kelantan. Raja Mas Kelantan memerintah hingga tahun 1698. Selepas Raja Mas Kelantan, Patani diperintah oleh anaknya Raja Mas Chayam yang memerintah Patani Besar dalam dua sesi. Sesi pertama mulai tahun 1698 hingga tahun 1702, sedang sesi kedua mulai tahun 1716 hingga tahun 1718. Bagi selang antara dua sesi ini yaitu tahun 1702 hingga tahun 1716 negeri Patani diperintah oleh dua orang raja : Raja Dewi (1702 - 1711) dan Raja Bendang Badang (1711-1716) (Shukri, 1985 : 143). Setelah itu banyak raja-raja lain baik dari keturunan dan hubungan perkawinan menjadi raja di Patani besar, tentunya dengan berbagai kisah politik yang dinamis dan panjang. Raja Patani yang terakhir sebelum kejatuhannya kepada Siam ialah raja Muhammad yang bergelar Sultan Muhammad. Baginda ialah anak dari pada Raja Bakar dan memerintah Patani mulai tahun 1774 sebelum terbunuh dalam peperangan dengan Siam pada tahun 1785.

BAB 3

SUKSESI KERAJAAN SIAM DAN KETERLIBATAN INGGRIS

Kerajaan Patani Besar dan Kerajaan Siam telah memiliki hubungan buruk sejak lama. Hal ini dimulai jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa menguasai daerah Asia Tenggara, Patani besar dan Siam sudah melakukan berbagai konflik peperangan namun berakhir pada kemenangan Patani. Patani memiliki aliansi kuat selain gabungan dari kerajaan Trengganu dan Kelantan juga Jepang. Namun puncaknya saat bangsa Eropa sudah mulai menguasai wilayah-wilayah sekitar Siam dan Patani, kerajaan Siam mulai mendapatkan aliansinya dan memenangkan secara telak pertempuran terakhir dengan Patani yang berakhir pada kehancuran kerajaan Patani besar.

3.1 Kekalahan Patani Atas Siam

Upaya Siam menaklukkan Patani dimulai kembali sejak pada tahun 1603. Motif sakit hati yang disebabkan penyerangan Patani ke Ayuthaya pada tahun 1563 serta kemakmuran yang dinikmati Patani selama abad ke-17 dan abad ke-18, membuat Siam tetap menjadikan Patani sebagai tujuan agenda penaklukan jangka panjang yang tetap dan terus menerus. Agenda ini sambung menyambung dari raja ke raja yang lain sehinggalah sampai pada jatuhnya Patani pada tahun 1785. Jumlah keseluruhan masa yang diambil bagi Siam untuk menaklukkan Patani ini adalah 182 tahun. Serangan pertama dilancarkan pada tahun 1003 saat Patani sedang diperintah oleh Raja Perempuan yang bernama Raja Hijau. Serangan pertama Siam ke Patani dipimpin oleh Panglima Okya Dicha (seorang angkatan laut Siam dari masa kerajaan Ayuthaya di bawah kepemimpinan Raja Naresuan) (Longlai, 2006). Namun, serangan ini dapat ditaklukkan oleh Patani dengan bantuan pihak asing yang telah lama bekerjasama dengan Patani seperti Jepang pada waktu itu.

Peperangan demi peperangan terus terjadi hingga Siam sukses menyerang Patani pada tahun 1785. Patani kalah dalam pertempuran terakhir ini. Sultan Muhammad Shah tewas di medan tempur sebaliknya Siam berjaya membawa

balik kemenangan selepas gagal dalam menaklukkan Patani sejak lebih dari satu setengah abad sebelumnya. Pada waktu kemenangan ini dicapai Siam diperintah oleh Raja Rama Thibodi atau lebih dikenal dengan nama "Rama I". Beliau adalah penggagas dinasti raja-raja Rama yang memerintah Thai sekarang (Longlai, 2006). Kerajaan Kedah yang melihat kejatuhan Patani di depan matanya segera membuat perjanjian "menyewakan" Pulau Penang kepada Inggris pada tahun 1786, dengan janji bahwa Inggris akan melindunginya ancaman Siam. Hal ini adalah awal mula siasat Siam dengan Inggris menjajah dari wilayah kerajaan Patani Besar termasuk Kedah.

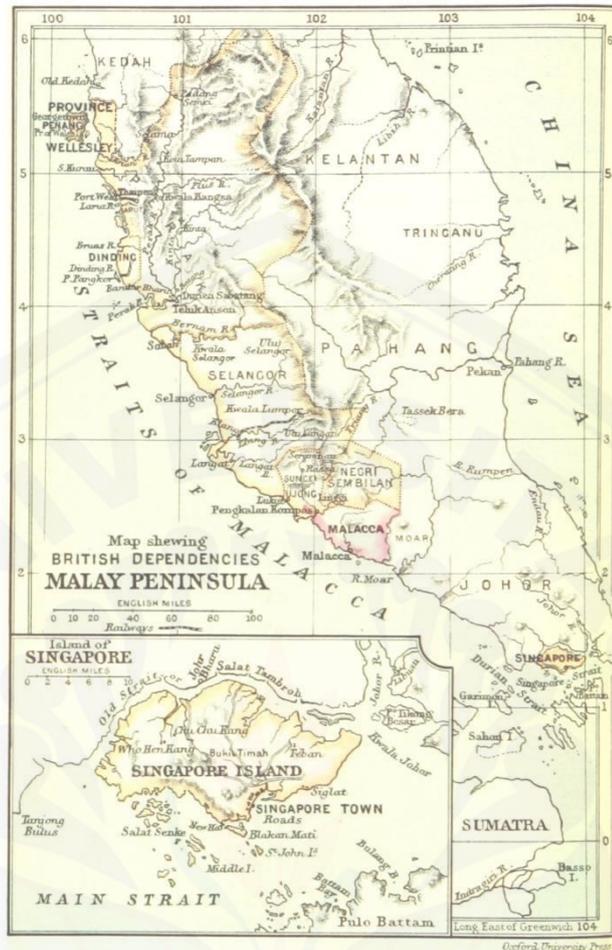
3.2 Keterlibatan Inggris Dalam Konflik Siam-Patani

Inggris pertama kali secara resmi terlibat dalam politik Semenanjung Melayu pada tahun 1771. Ketika Inggris mencoba mendirikan pos perdagangan di Penang, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kedah. Inggris menjajah Singapura pada tahun 1819 dan memegang kendali penuh atas negara Malaysia kemudian. Pada pertengahan abad ke-18, perusahaan-perusahaan Inggris dapat ditemukan berdagang di Semenanjung Malaya. Pada bulan April 1771, Jourdain, Sullivan dan de Souza, sebuah perusahaan Inggris yang berbasis di Madras, India, mengirim Francis Light untuk menemui Sultan Kedah, Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin II, untuk membuka pasar negara untuk perdagangan (Sinugboanong, 2002). Light adalah seorang kapten dalam pelayanan East India Company. Singkat cerita perdagangan antar kedua negara berjalan maju dan Inggris mulai menyewa wilayah-wilayah seperti George Town (ibukota Penang), di seberang Selat Utara yang bernama Butterworth dan di daratan tengah yang dikenal sebagai Seberang Perai, sebelumnya Provinsi Wellesley.

Pada masa ini, Sultan Kedah sedang menghadapi ancaman eksternal dari Siam yang berperang dengan Burma. Karena Siam melihat bahwa Kedah sebagai negara selanjutnya yang dapat dikuasai setelah Patani, kerajaan Siam sering menuntut Kedah mengirim bala bantuan namun Kedah dalam banyak kasus, enggan untuk membantu Siam (Sinugboanong, 2002). Faktor ini yang akhirnya membuat kekhawatiran Sultan Kedah dan pada akhirnya melakukan negosiasi

dengan Light. Sultan setuju untuk mengizinkan Jourdain, Sullivan, dan de Souza untuk membangun dan mengoperasikan pos perdagangan di Kedah dengan syarat jika Inggris setuju untuk melindungi Kedah dari ancaman eksternal. Light menyampaikan pesan ini kepada atasannya di India, namun bagaimanapun, ternyata East India Company tidak setuju dengan proposal tersebut.

Dua tahun kemudian, Sultan Muhammad Jiwa meninggal dan digantikan oleh Sultan Abdullah Mahrum Shah. Sultan baru ini menawarkan pembentukan perusahaan Cahaya (yang kemudian menjadi perwakilan Inggris) di pulau Penang dengan imbalan bantuan militer untuk Kedah. Namun, EIC tetap menolaknya dan memerintahkan untuk mengambil alih Penang dan tidak memberinya jaminan bantuan militer yang diminta Sultan. Light kemudian mengambil alih Penang dan menipu Sultan dengan meyakinkan Sultan bantuan militer. Segera Kompeni memutuskan dan memberi tahu Light bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan militer kepada Kedah. Pada Juni tahun 1788, Light memberi tahu Sultan tentang keputusan Perusahaan. Merasa tertipu, Sultan memerintahkan perusahaan Cahaya untuk meninggalkan Penang, tetapi Cahaya menolak. Penolakan Light menyebabkan Sultan memperkuat pasukan militer Kedah dan membentengi Prai. Menyadari ancaman ini, Inggris bergerak masuk dan merobohkan benteng di Prai. Inggris dengan demikian memaksa Sultan untuk menandatangani perjanjian yang memberi Inggris hak untuk menduduki Penang; sebagai gantinya, Sultan menerima sewa tahunan sebesar 6.000 peso Spanyol. Pada tanggal 1 Mei 1791, Bendera koloni secara resmi dinaikkan di Penang untuk pertama kalinya. Pada tahun 1800, Kedah menyerahkan Prai ke Inggris dan Sultan menerima kenaikan 4.000 peso dalam sewa tahunannya. Penang kemudian dinamai Pulau Pangeran Wales, sementara Perai dinamai Provinsi Wellesley. Pada tahun 1821, Siam menyerbu Kedah, menduduki ibukota Alor Star dan menduduki Negara Kedah dan Patani Besar secara keseluruhan sampai tahun 1842. Siasat penyerangan ini sukses terjadi akibat kerja sama dengan Inggris yang sejak awal ingin menguasai semenanjung Melayu ini. Pada akhirnya Siam dan Inggris sukses dalam memporak-porandakan negara Patani Besar, dengan kekuasaan yang mereka bagi-bagi sesuai kesepakatan mereka sendiri (Sinugboanong, 2002).



Gambar 1.2 Peta Kekuasaan Inggris sebelum perjanjian Anglo-Siam
 Sumber : (Sinugboanong. 2002. Sejarah Konflik Siam-Inggris Tahun 1909.
<https://th.wikipedia.org/wiki/> ["Diakses pada"] 19 November 2019)

3.3 Proses Pembentukan Perjanjian Anglo-Siam

3.3.1 Persekutuan Antara Siam dan Inggris

Secara garis besar terdapat dua perjanjian sebelumnya yang mendasari terbentuknya perjanjian Anglo-Siam tahun 1909 yaitu Perjanjian Bowring tahun 1855 dan Perjanjian Rahasia tahun 1897. Kedua perjanjian ini berisi negosiasi dan motif awal Siam dan Inggris untuk bekerjasama dalam kepentingan masing-masing. Perjanjian Bowring berisi salah satunya untuk membuka perdagangan dan kerja sama antara Siam dan Inggris (Longlai, 2006). Sedangkan Perjanjian Rahasia antara Siam dan Inggris tahun 1897 adalah sebuah kesepakatan antara kerajaan Siam dan Inggris untuk menenyapkan kerajaan-kerajaan Melayu.

Permasalahan dikepungnya Siam oleh ancaman penjajahan Barat di mana Perancis menjajah Laos dan kawasan-kawasan sebelah timur Mekong (sebelah timur Siam) pada 1893 dan Inggris di bagian Burma dan sepanjang Laut Cina Selatan (kecuali yang telah diduduki Perancis). Melihat kondisi ini Siam khawatir akan kehilangan wilayahnya, akhirnya Siam meminta bantuan Inggris untuk mengamankan wilayahnya. Padasisi lain Inggris melihat bahwa rencana Jerman yang telah melakukan lobby politik di daerah-daerah kerajaan Melayu seperti berencana untuk menyewa sebuah dermaga di Kerajaan Kelantan bagian laut Andaman akan mengancam rencana kuasa Inggris pada wilayah tersebut maka dari itu dari kedua alasan kepentingan Siam dan Inggris inilah siasat untuk menaklukkan kerajaan Melayu raya semakin besar (Kateh, 2015 : 116). Hubungan Siam dan Inggris sudah berlangsung lama sebelumnya dan hal ini membuat rencana untuk menghapuskan kerajaan-kerajaan Nusantara Melayu di tengah-tengah kekuasaan Siam dan Inggris mulai diluncurkan. Siam yang datang dari utara dan Inggris yang menguasai bagian Selatan berusaha mengambil kerajaan-kerajaan di antara kedua kerajaan ini yaitu kerajaan-kerajaan Melayu.

3.3.2 Proses Negosiasi Antara Siam dan Inggris

Pada bulan April 1907, Inggris meminta untuk mengadakan perundingan ulang untuk menghapuskan perjanjian sebelumnya (Perjanjian Rahasia tahun 1897) yang dianggap Inggris merugikan dan tidak seimbang dengan Siam. Inggris meminta kerajaan Siam supaya menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara seperti Kelantan, Kedah dan Terengganu kepada Inggris. Pada pandangan Inggris, perjanjian sebelumnya yang tidak seimbang (perjanjian Bowring 1857 dan perjanjian Rahasia 1897) antara Inggris dengan Siam merupakan hambatan utama kepada kemajuan perdagangan negara Inggris. Apalagi berhubungan dengan negeri-negeri Melayu Utara, Inggris berpendapat bahwa negeri-negeri tersebut tidak memberikan manfaat kepada Siam, karena negeri-negeri tersebut terletak sangat jauh dengan kerajaan Bangkok, sebagai pusat pemerintahan kerajaan Siam (Longlai, 2006).

Gagasan untuk menggariskan perbatasan tanah Melayu-Siam ini dimulai saat penasehat kerajaan Siam yaitu Edward Strobel merencanakan beberapa perjanjian pada tahun 1907 dengan menteri Inggris Relph Paget. Pada 1 Juli tahun 1907, perundingan telah diadakan di kota Bangkok antara Edward Strobel dengan Relph Paget namun, Raja Siam menegaskan bahwa Siam tidak akan menyerahkan wilayah Kedah tetapi boleh menyerahkan Kelantan dan Terangganu. Hal ini menimbulkan sedikit persengketaan, karena selain wilayah Kedah, Kelantan dan Terangganu, Paget merencanakan untuk meminta negeri Perlis dan Setul yang merupakan bagian dari pada negeri-negeri Melayu yang di taklukkan di bawah kekuasaan Siam dengan Perjanjian Rahasia tahun 1897. Hal ini Inggris bisa menguasai wilayah-wilayah tersebut. Tetapi Strobel akhirnya hanya menyetujui Perlis, karena menurut beliau Setul (Patani) dengan penduduknya hanya sekitar 60% dan lebih dekat dengan Siam apalagi rencana untuk penyerahan Pulau Langkawi dengan daerah Raman di selatan Patani dirasa juga tidak terlalu penting untuk dimiliki Siam ditambah. Karena sebelum ini adanya pertikaian dengan Perak dalam usaha menggantikan penyerahan Kepulauan Tarutau yang terletak di barat Langkawi kepada pemerintahan Siam membuat kemudian Strobel mempertimbangkan penahanan Setul untuk Siam.

Pada 23 November 1907, Strobel memberitahukan rencana itu kepada Raja Chulalongkorn, kemudian Raja Chulalongkorn hanya ingin menyerahkan Kelantan dan Terangganu kepada Inggris. Sebaliknya Ralph Paget menegaskan bahwa Raja Chulalongkorn harus pula menyerahkan Kedah. Dalam masa perundingan berjalan Ralph Paget memberitahukan kepada Strobel akan hasrat Inggris yang ingin mendapatkan lebih wilayah Siam yang lain seperti Patani, Perlis dan Setul. Hal ini menurut Inggris dikarenakan berdasarkan komposisi wilayah itu di mana daerah tersebut merupakan kepunyaan Kerajaan Kedah juga karena memiliki komposisi dominan etnis-Melayu, yang memiliki budaya dan kedudukan Geografi yang sama. Ralph Paget juga menegaskan keinginan Pulau Langkawi juga diserahkan kepada Inggris. Prundingan ini tidak mendapat keputusan sehingga perundingan bisa berhenti (Longlai, 2006).

Pada bulan Januari 1908, Edward Strobel meninggal dunia kemudian perjanjian diteruskan dan diambil alih oleh Westengard. Beliau adalah pembantu Strobel. Perundingan resmi antara Paget dengan Westengard kemudian berlangsung pada tanggal 25 Januari 1908. Perundingan itu kemudian mendapatkan persetujuan dengan penyerahan wilayah Pulau Langkawi dan Legeh, sungai Perak di wilayah Reman sebagai pengganti Setul untuk Inggris. Kemudian raja Chulalongkorn setuju melepaskan sungai Perak di wilayah Raman dan Pulau Langkawi, tetapi dengan syarat Inggris harus setuju memberikan pinjaman keuangan bagi pembinaan jalan keret api untuk Siam. Paget agak keberatan terhadap tuntutan Siam itu (Longlai, 2006). Walau bagaimanapun, perbedaan pandangan itu tidak menghalangi kedua pihak untuk pada akhirnya menyusun beberapa draf perjanjian yang isinya meliputi soal penyerahan wilayah-wilayah yang tertuang dalam perjanjian Anglo-Siam.

BAB 5

KESIMPULAN

Perjanjian Anglo-Siam tahun 1909 merupakan akar dari permasalahan konflik keamanan di wilayah Thailand Selatan hingga saat ini. Hal ini dimulai sejak peristiwa sejarah peperangan Kerajaan Patani dengan Kerajaan Siam yang berlangsung lama hingga datangnya kolonial Inggris. Realita ini menimbulkan ambisi untuk saling menguasai wilayah satu dengan yang lain tidak terelakkan. Pada saat Kerajaan Patani kalah terhadap Kerajaan Siam dan akhirnya wilayah Patani diambil alih oleh Siam namun dalam prosesnya masih mengalami kesulitan akibat penolakan dan perlawanan dari masyarakat Patani. Dengan adanya kekuatan Inggris yang juga ingin menguasai wilayah Kerajaan Patani. Momentum ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Siam dan Inggris karena kedua kekuatan besar tersebut melihat bahwa kondisi politik internal kerajaan Patani telah melemah sehingga pada akhirnya kerajaan Siam dan Inggris bersepakat untuk bersama-sama menghapuskan Kerajaan Patani secara resmi dengan dibentuknya Perjanjian Anglo-Siam tahun 1909. Motif dan tujuan untuk menguasai wilayah lain ini yang disebut sebagai teori pericentric dalam imperialisme.

Implikasi dari perjanjian Anglo-Siam tahun 1909 telah membuat hilangnya kerajaan Patani. Inggris dan Siam sepakat membagi wilayah kerajaan Patani menjadi wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Hal ini berkaitan secara politik pada hilangnya otoritas pemerintahan kerajaan Patani dan dimasukkannya wilayah-wilayah kerajaan Patani kepada kekuasaan Inggris dan Siam. Secara otomatis implikasi dari peristiwa tersebut membuat masyarakat Melayu-Muslim di wilayah bagian Thailand Selatan kehilangan jatidiri mereka karena harus patuh dan tunduk pada kebijakan-kebijakan yang dibuat penjajahnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Fatani, Ahmad Fathy. 1994. *PANGANTAR SEJARAH PATANI*. Alor Setar : Pustaka Darussalam.
- Crawford, James (2006). *The Creation of States in International Law*. New York : Clarendon Press.
- Shukri, Ibrahim. 1985. *Buku Sejarah Kerajaan Melayu Patani*. Ohio University: Center for International Studies.
- Teeuw, A. dan David K. Wyatt. 1970. *Hikayat Patani*. Patani: Martinus Nijhoff.

Jurnal

- Cohen, Benjamin J. 1973. The Question of Imperialism. *The Political Economy of Dominance and Dependence*. 72(1): 362-363
- Croft, S., & Beresford, P. (1992). The politics of participation. *Critical Social Policy*. 12(35): 20–44.
- Lake, D. A. 2001. Imperialism: Political Aspects. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. 1(23) : 733
- Robinson, O.F. 2013. Lawyers and Jurists. *Gorgia Journal of International and Comparative Law*. 41(3)

Karya Ilmiah

- Kateh, P. 2015. Pengaruh perjanjian Anglo-Siam dan Respon Masyarakat Muslim. *Skripsi*. UIN KALIJAGA:Yogyakarta.
- Taufiqillah, Al Mufti. 2017. Efektifitas penggunaan dalam meningkatkan keterampilan menulis di kelas XI Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ariy Sidoarjo. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Universitas Songkhla Nakarin. 1975. *Naskah rusembilan*. Fakultas pendidikan, Universitas songkhla nakarin.

Internet

Longlai, Acharawit Kokuisurapat. 2006. Perjanjian Anglo-Siam Tahun 1909 dan Pertukaran Wilayah Pulau Malaka. https://www.silpa-mag.com/history/article_29737. [“Diakses pada”] 17 November 2019.

Suphasit, Tanongsirawat. 2012. Sejarah dan Informasi Tentang Thailand. https://www.ditp.go.th/contents_attach/143622/143622.pdf [“Diakses pada”] 18 Mei 2020.

Southern News Center. 2019. Teror dan Kekerasan Menghantui Wilayah Selatan. <https://www.isranews.org/content-page/67-south-slide/74565-pattalung.html>. [“Diakses pada”] 9 Januari 2020.

Sinugboanong, Binisaya. 2002. Sejarah Konflik Siam-Inggris Tahun 1909. <https://th.wikipedia.org/wiki/> [“Diakses pada”] 19 November 2019.